

Ketimpangan Wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

Heru Wahyudi¹, Farida Aliyatul Asy'ariati²

Economics and Business Faculty, University of Lampung, Bandar Lampung, Indonesia^{1,2}.

heru.wahyudi@feb.unila.ac.id,



Riwayat Artikel

Diterima pada 31 Agustus 2022

Revisi 1 pada 9 September 2022

Revisi 2 Pada 17 September 2022

Disetujui pada 24 September 2022

Abstract

Purpose: The purpose of the study was to determine the regional inequality of districts/cities in Lampung Province before and during the COVID-19 pandemi.

Research methodology: The analytical tool used in this research is quantitative descriptive analysis method. In conducting this research, the researcher used the help of the Microsoft Excel 2010 analysis tool.

Results: The Williamson index of districts/cities in Lampung Province throughout the 2016-2019 period has increased every year. The index value in 2016 was 0.26, increasing to 0.28 in 2017, 2018 and 2019 reaching 0.32, while regional inequality in 2020 also increased in 2021 to 0.27. Theoretically, the gap rate is still at a low level of economic disparity between regions (less than 0.35).

Limitations: The limitation in this study is to use quantitative analysis without looking at the effect of independent variables on inequality (without regression analysis).

Contribution: The results obtained from this study are expected to be one of the references in making policy directions based on the data presented to adjust the right policies, especially to reduce inequality between regencies/cities in Lampung Province, through efforts to reduce the number of poor people.

Keywords: Lampung, Regional Inequality, Williamson

How to cite: Wahyudi, H., Farida Aliyatul Asy'ariati, F, A. (2022). Ketimpangan Wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 143-155.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan suatu negara. Secara agregat pertumbuhan ekonomi dilihat melalui pencapaian nilai total Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Dalam komponen pertumbuhan Todaro & Smith (2015) membagi tiga komponen penting pertumbuhan ekonomi, pertama adalah akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik, dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ketrampilan kerja. Kedua, pertumbuhan jumlah penduduk yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi atau cara-cara baru menyelesaikan pekerjaan.

Selain pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan (*income inequality*) juga menjadi isu penting bagi pembangunan setiap negara. Secara teoritis dan didukung oleh banyak penelitian empiris terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan berkaitan dengan pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan dimasyarakat semakin tidak merata. Kondisi ini pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan (*gap*) antara masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif baik (kelompok kaya) dengan mereka yang berpendapatan rendah (kelompok miskin).

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia baik di negara yang maju maupun negara berkembang yang juga merupakan isu penting untuk di tinjau dan perlu adanya berbagai upaya dari pemerintah dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, serta peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai macam usaha dalam rangka peningkatan dari berbagai macam aspek yang ada (Kalalo et al., 2016). Ketidak merataan terjadi di seluruh dunia, jadi masalah ini juga terdapat pada negara-negara yang sudah maju namun yang terjadi di negara-negara maju lebih kecil atau sudah tidak terlihat jelas dibandingkan yang terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang.

Di era otonomi daerah sekarang ini, di mana setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola potensi daerah yang dimilikinya secara tepat sehingga akan mendorong terciptanya proses pembangunan dengan tingkat pemerataan yang baik dan disertai pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Provinsi Lampung sebagai bagian dari perekonomian nasional, dan mempunyai struktur ekonomi yang relatif sama maka strategi dan kebijakan pembangunan yang harus diterapkan pun relatif sama. Permasalahan ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung menjadi salah satu permasalahan yang harus di cari solusinya, hal tersebut dapat dilihat dalam salah satu misi Provinsi Lampung “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah”.

Di tengah upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, di awal tahun 2020 dunia digemparkan oleh corona virus yang sangat mudah menular. Adanya pandemi Covid-19 membuat pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang berpengaruh terhadap masyarakat. Mobilitas masyarakat menjadi terbatas, selain itu juga perpindahan barang dan jasa menjadi terhambat, tentu hal tersebut berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Kondisi perekonomian sebelum dan selama masa pandemi tentu berbeda salah satunya aalah terkait dengan ketimpangan pembangunan.

Ketimpangan pembangunan selama ini berlangsung dengan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek, dan dimensi. Seperti ketimpangan hasil pembangunan misalnya dalam hal pendapatan perkapita atau pendapatan daerah, dan ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Munculnya kawasan-kawasan kumuh di tengah beberapa kota besar, serta sebaliknya hadirnya kantong-kantong pemukiman mewah di tepian kota atau bahkan di pedesaan adalah suatu bukti nyata ketimpangan yang terjadi. Perbedaan gaya hidup masyarakat merupakan bukti lain dari ketimpangan.

Apa yang disebut dengan proses “*trickle-down effect*” dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi penduduk miskin tidak terjadi. Sebagian besar NSB yang mengalami laju pertumbuhan relatif tinggi tidak membawa manfaat yang berarti bagi penduduk miskinnya. Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama, kemiskinan absolut, di mana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan (Kuncoro, 2001).

Kondisi ketimpangan wilayah tidak bisa dilepaskan dari keadaan demografis dan ketenagakerjaan. Hasil penelitian Kalalo et al. (2016) menunjukkan bahwa penduduk merupakan salah satu penyebab meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan. Di lain sisi, meskipun penduduk membawa pengaruh yang tidak baik terhadap ketimpangan, dengan menekan dan mengupayakan tingkat pengangguran yang rendah ketimpangan diharapkan akan berkurang. Todaro & Smith (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk biasanya memicu timbulnya masalah lain seperti struktur umur muda, jumlah pengangguran yang semakin lama semakin tinggi, urbanisasi dan lain sebagainya. Todaro & Smith (2006), juga menambahkan bahwa masalah kependudukan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, maupun antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor. Hasil penelitian Kalalo et al., (2016) menunjukkan bahwa populasi penduduk menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan

distribusi pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk akan berpengaruh pula pada ketimpangan distribusi pendapatan apabila tidak ada kenaikan produktivitas tenaga kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam proyeksi penduduk Lampung tahun 2010-2035 jumlah penduduk Lampung selama kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, banyaknya jumlah penduduk menunjukan keberhasilan dalam bidang kesehatan yang di ukur dengan indikator angka harapan hidup. Ditinjau menurut wilayah kabupaten/kota angka harapan hidup mengalami peningkatan setiap tahunnya dapat diartikan bahwa derajat kesehatan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Lampung relatif membaik, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan di suatu kabupaten/kota Provinsi Lampung, tingkat harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah yang tergolong relatif baik dapat menciptakan tenaga kerja sesuai dengan keahlian masing-masing tenaga kerja sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, namun hal tersebut hanya mengelompok pada daerah-daerah pusat aktivitas ekonomi, terutama pada daerah perkotaan dan industri atau daerah yang berpendapatan tinggi saja sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak merata dan mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi seperti pada Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat, dan sebagian Tanggamus menghadapi kesulitan mengembangkan wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan aksesibilitas wilayah. Kawasan perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam semakin membatasi akses penduduk, baik terhadap pusat-pusat perekonomian maupun terhadap pelayanan dasar lainnya. Melihat dari kondisi Provinsi Lampung tersebut, dapat dikatakan pemerintah telah melakukan upaya dalam mengurangi tingkat ketimpangan, namun saat ini, ketimpangan tersebut masih terjadi. Untuk itu penelitian ini berupaya untuk menganalisis ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Landasan Teori

Pembangunan Ekonomi

Todaro & Smith (2015) menjelaskan bahwa pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional; serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pendapat yang sama diutarakan oleh Amartya Sen dalam Todaro & Smith (2015) bahwa kapabilitas untuk berfungsi (*capabilities to function*) adalah yang paling menentukan status miskin-tidaknya seseorang. Dari apa yang telah dijelaskan, pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya tidak dapat dianggap sebagai tujuan akhir. Pembangunan haruslah lebih memperhatikan peningkatan kualitas kehidupan dan kebebasan.

Ketimpangan Wilayah

Kesenjangan atau ketimpangan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan (Baidhawry, 2015). Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang (Jhingan, 1999). Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang (Andiny & Mandasari, 2017).

North (1955) memunculkan ketimpangan antar wilayah dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori ini dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa tersebut dikenal sebagai hipotesa Neo Klasik. Menurut hipotesa Neo Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan cenderung mengalami peningkatan terus-menerus. Hal ini akan terus terjadi sehingga ketimpangan mencapai titik puncak. Apabila proses pembangunan berlanjut,

maka ketimpangan pembangunan akan mengalami penurunan. Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi pada negara yang sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada negara yang maju.

Kebenaran hipotesa Neo Klasik ini diuji oleh Williamson (2018) melalui studi ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan sedang berkembang menggunakan *data time series* dan *cross section*. Hasilnya adalah hipotesa Neo Klasik terbukti benar secara empirik. Menurut Williamson hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu.

Dengan menggunakan alat analisis indeks entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung. Indeks ketimpangan entropi Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu. Indeks ketimpangan entropi Theil juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu, sedang yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ ketimpangan spasial. Sebagai contoh kesenjangan/ ketimpangan antar daerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan (Kuncoro, 2001).

Pengembang Hipotesis

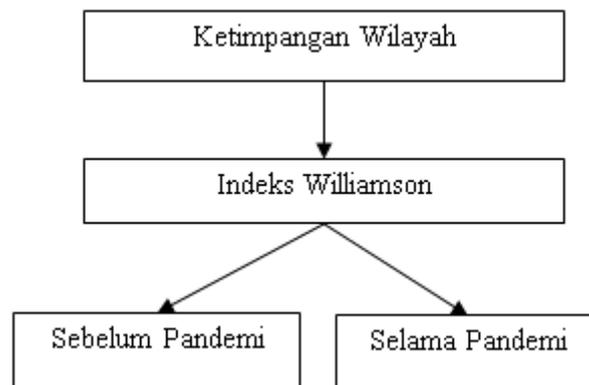
Menurut Williamson hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan disparitas berkurang dengan signifikan. Menurut Kuncoro, konsep entropi Theil dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris yang dilakukan Theil dengan menggunakan indeks entropi menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional dan distribusi produk domestik bruto dunia. Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto propinsi.

Ying menggunakan indeks ketimpangan regional. Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua subindikasi yaitu ketimpangan regional dalam 10 wilayah dan ketimpangan regional antar wilayah atau regional Ying dalam (Kuncoro, 2001). Dengan menggunakan alat analisis indeks entropi Theil akan diketahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi di Provinsi Lampung. Indeks ketimpangan entropi Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama waktu tertentu. Indeks ketimpangan entropi Theil juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu, sedang yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ ketimpangan spasial. Sebagai contoh kesenjangan/ketimpangan antar daerah dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan (Kuncoro, 2001).

Selain itu akibat sering terkonsentrasinya pada pembangunan perekonomian di daerah maka kemiskinan yang muncul akibat ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin terlihat jelas. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional per kapita jika tidak diimbangi pemerataan distribusi pendapatan, maka tingkat kemiskinan akan terus meningkat. Akan tetapi jika pemerataan pendapatan sudah sangat baik sedangkan tingkat pendapatan nasional tidak mengalami peningkatan berarti prestasi kegiatan ekonomi tidak semakin membaik.

Wahyuni, R. N. T., & Monika (2017) yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Anshari, M.,

Azhar, Z., & Ariusni (2019) bahwa rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah yang dapat diindikasikan bahwa pendidikan tidak selalu mempengaruhi ketimpangan wilayah. Berdasarkan uraian di atas secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif yaitu menjelaskan hubungan antar data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan data time series dari tahun 2016-2019 (sebelum covid-19) dan 2020-2021 (selama covid-19).

Dalam penelitian ini meneliti 13 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Lampung. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, buku bacaan dan sumber dari media online sebagai referensi yang dapat menunjang penulisan ini. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang digunakan untuk menghitung ketimpangan wilayah (indeks williamson), adalah PDRB perkapita dan jumlah penduduk miskin. Dalam penelitian ini juga membahas kondisi sebelum pandemi covid-19 dan masa pandemi covid-19 terkait, PDRB perkapita, rata-rata lama sekolah, dan jumlah penduduk miskin.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran
Ketimpangan Wilayah – Indeks Williamson	Skala nilai Indeks Williamson berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat tidak merata (sangat timpang).	$IW = \frac{\sqrt{\sum (y_i - y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{y}$ Keterangan: IW : Indeks Williamson Y _i : PDRB perkapita di Kabupaten/ Kota i Y : PDRB perkapita rata-rata Provinsi Lampung F _i : Jumlah penduduk di kabupaten/kota i, n : Jumlah penduduk Provinsi Lampung.
PDRB Perkapita	Nilai PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu.	$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Jumlah penduduk}}$

Penduduk Miskin	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p>Keterangan:</p> <p>α : 0</p> <p>z : Garis kemiskinan</p> <p>y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q) $y_i < z$</p> <p>q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p> <p>n : Jumlah penduduk</p>
Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>Keterangan:</p> <p>RLS : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>X_i : Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>n : Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>

4. Hasil dan Pembahasan

Ketimpangan wilayah sebelum pandemi Covid-19

Kesenjangan antar wilayah kabupaten kota di Provinsi Lampung tidak terlepas dari keragaman potensi sumber daya alam, letak geografis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur daerah, dan faktor-faktor lain, termasuk di antaranya kemampuan ekonomi dan keuangan pemerintah daerah. Salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah Indeks Williamson. Skala nilai Indeks Williamson berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat perekonomian wilayah yang sangat tidak merata (sangat timpang). Berikut disajikan ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebelum adanya pandemi Covid-19.

Tabel 2. Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota di Lampung Sebelum Covid-19

Tahun	IW Kabupaten Kota
2016	0,26
2017	0,28
2018	0,30
2019	0,32

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Indeks Williamson kabupaten/kota di Provinsi Lampung sepanjang periode tahun 2016-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai indeks pada tahun 2016 sebesar 0,26 meningkat menjadi 0,28 di tahun 2017, 2018 dan 2019 mencapai 0,32. Ketimpangan tinggi bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi, memperparah konflik, dan menghambat potensi generasi sekarang dan masa depan. Ketimpangan tinggi bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi, memperparah konflik, dan

menghambat potensi generasi sekarang dan masa depan. Ketimpangan naik karena empat sebab utama. Pertama, banyak anak-anak, terutama dari rumahtangga miskin dan di desa, tidak memperoleh awal hidup yang samadengan anak-anak dari keluarga yang lebih kaya. Akibatnya, mereka tumbuh dengan kesehatan dan keterampilan yang kurang. Kedua, hanya sebagian kecil tamatan sekolah memiliki keterampilan yang berguna untuk ekonomi modern, merekalah yang bisa memperoleh pemasukan lebih tinggi dari pekerjaan formal.

Ketiga, kepemilikan aset keuangan dan properti semakin terkonsentrasi di tangan mereka yang paling kaya. Satu estimasi menunjukkan bahwa 50 persen seluruh aset dimiliki oleh 1 persen penduduk Indonesia, konsentrasi kekayaan ini termasuk tertinggi di dunia. Keempat, hanya pegawai negeri sipil dan keluarga kaya yang memiliki jaminan kesehatan dan pekerjaan seperti pensiun, juga tabungan yang cukup. Ketika terjadi guncangan terkait kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam seperti covid-19, sebagian besar masyarakat terpaksa meminjam dari teman, keluarga, menjual aset mata pencaharian mereka seperti ternak, atau mengeluarkan anak dari sekolah untuk menghemat pengeluaran dan membantu mencari pemasukan.

Sari et al. (2017) menemukan bahwa tidak semua Kabupaten/Kota mengalami pertumbuhan yang positif, terdapat 5 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung mengalami perkembangan yang berfluktuasi negatif dan 1 Kabupaten/Kota mengalami kemunduran dan pada tahun 2016 di Provinsi Lampung memiliki 4 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori wilayah tertinggal. Sektor unggulan yang terdapat di Provinsi Lampung masih di dominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota Kota yang memiliki sektor unggulan paling banyak adalah Kabupaten Tulang Bawang dengan total sebanyak 17 sektor unggulan. Implikasi kebijakan pembangunan di Provinsi Lampung terbagi ke dalam dua bagian yaitu berimplikasi negatif dan kebijakan pembangunan berimplikasi positif terhadap penurunan tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Ketimpangan Wilayah Kabupaten Kota Selama Covid-19

Pada masa pandemi Covid-19 tentunya perekonomian di setiap negara, termasuk Indonesia akan mengalami gangguan. Pemerintah selaku pembuat kebijakan perlu melakukan terobosan – terobosan terbaru terkait dengan penyesuaian dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Santoso & Mukhlis (2021) menyatakan bahwa pada data selama pandemi COVID-19 didapatkan hasil kondisi ketimpangan di Indonesia mengalami perubahan dimana aspek mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan pada kondisi pandemi yang membuat pemerintah melakukan kebijakan *lockdown* atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan adanya kebijakan PSBB selama Covid-19 berpengaruh terhadap masyarakat. Masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah sangat rentan terhadap kebijakan ini. Masyarakat kelas bawah banyak yang bekerja pada sektor informal yang membutuhkan kerja langsung ke lapangan. Dengan adanya kebijakan ini akan berdampak pada pekerjaan mereka. Banyak masyarakat yang tidak bisa melakukan aktivitas konsumsi karena pendapatan mereka yang turun. Di satu sisi, masyarakat dengan pendapatan menengah keatas tidak begitu berdampak dengan munculnya pandemi ini. Hal ini dikarenakan mereka memiliki tabungan yang lebih serta pendapatan yang lebih untuk bertahan selama masa pandemi, sehingga tidak akan mempengaruhi konsumsi dari masyarakat tersebut. Berikut disajikan ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama pandemi Covid-19.

Tabel 3. Ketimpangan Wilayah Kabupaten/Kota di Lampung Selama Covid-19

Tahun	IW Kabupaten Kota
2020	0,26
2021	0,27

Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Ketimpangan wilayah menurut perhitungan Indeks Williamson tahun 2020 sebesar 0,26 dan mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 0,27. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antarwilayah yang rendah (kurang dari 0,35). Kondisi ini tidak lepas dari adanya pengaruh kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Rudagi & Siska (2021) menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan terutama pendidikan di masa pandemi adalah: 1) Kondisi wilayah yang terletak di pedalaman. 2) Wilayah merupakan salah satu daerah yang tidak terjangkau jaringan seluler dan jaringan internet, sehingga menyulitkan siswa untuk belajar daring. 3) Tidak semua anak memiliki peralatan atau media penunjang sekolah atau kuliah daring. 4) Sulitnya menentukan metode pembelajaran untuk anak-anak yang bersekolah di dalam suatu wilayah.

Pembahasan

PDRB Perkapita

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi kaya akan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan masyarakatnya, guna membantu meningkatkan pembangunan daerah. Namun, potensi sumber daya yang melimpah tidak selalu merata disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Penyebab ketimpangan antar wilayah di Provinsi Lampung di antaranya adalah perbedaan kandungan sumber daya alam, sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja, investasi yang berbeda-beda antar wilayah, mobilitas barang dan jasa, alokasi dan bantuan pembangunan antar wilayah, dan konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Sedangkan pada umumnya pembangunan daerah akan difokuskan pada pembangunan ekonomi. Dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi diperlukannya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diikuti dengan membaiknya taraf hidup sasaran yang dicapai pada umumnya adalah untuk mencapai tingkat pertumbuhan PDRB jauh lebih tinggi dibanding dengan laju pertumbuhan penduduk.

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan dan menyebabkan ketimpangan pembangunan wilayah. Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi.

Provinsi Lampung terdiri atas 15 Kabupaten/Kota memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda disetiap Kabupaten/Kota. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan, dimana seharusnya kekayaan alam menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan pada nilai tambah tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (*spread effect*). Hanya saja kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh seluruh wilayah di Provinsi Lampung secara merata. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah. Menurut R. M. Sari et al., (2017) mengemukakan salah satu permasalahan ketimpangan yang menonjol di Lampung adalah kesenjangan antar daerah, sebagai konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di Wilayah yang berdekatan dengan ibu kota provinsi.

Ketimpangan wilayah dapat dihitung menggunakan Indeks Williamson yang menggunakan indikator PDRB perkapita dan jumlah penduduk. Ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah yang mula-mula dilakukan adalah *Williamson Index* yang digunakan dalam studi Jeffrey G. Williamson pada tahun 1966. Secara ilmu statistik, indeks ini sebenarnya adalah *coefficient of variation* yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah *Williamson Index* muncul sebagai penghargaan kepada pengguna awal indeks tersebut dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antarlain sensitif terhadap definisi wilayah yang

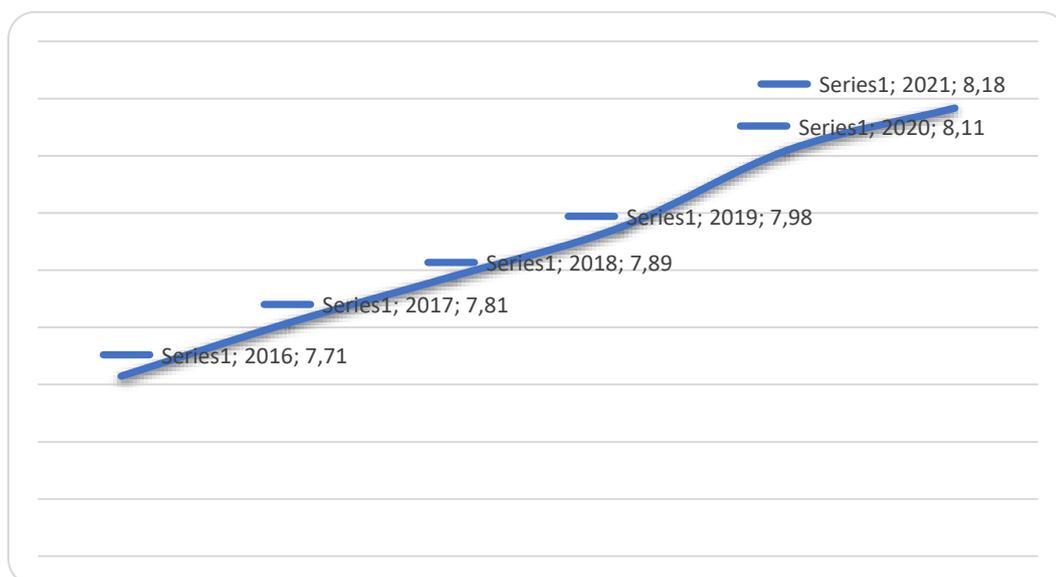
digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Berbeda dengan Gini Rasio yang lazim digunakan dalam mengukur distribusi pendapatan antargolongan masyarakat, *Williamson Index* menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dengan kenaikan dari PDRB perkapita tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertambahan penduduk. Menurut Todaro, laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan, di dalam bukunya Todaro mengemukakan karakter pertumbuhan ekonomi (*character of economic growth*) yaitu bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor-sektor mana saja yang mendapat prioritas, lembaga-lembaga apa yang menyusun dan yang mengatur, dan sebagainya. Karakter pertumbuhan ekonomi ini yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin atau tidak. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk.

Mengikuti Hipotesa Neo-Klasik variabel yang dapat digunakan sebagai variabel independen adalah pendapatan perkapita (PDRB perkapita) yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut, apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat sehingga ketimpangan pembangunan antarwilayah menurun.

Rata-rata lama sekolah

Ketika seseorang memiliki pendidikan yang lebih tinggi yang dibarengi dengan produktivitas yang juga tinggi maka akan mengurangi pula tingkat ketimpangan pendapatan. Pendidikan yang cukup dan memadai akan mempengaruhi tingkatan pendapatan seseorang dan membuat ketimpangan wilayah menjadi semakin merata. Ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya perbedaan produktivitas tenaga kerja dan perbedaan kualitas pendidikan. Ketika tenaga kerja memiliki produktivitas yang tinggi, maka lama sekolah akan berjalan beriringan dengan besaran pendapatan yang akan diterima. Karena ketika tenaga kerja berpendidikan tinggi namun tidak produktif saat bekerja, sangat mungkin memiliki pendapatan yang lebih rendah.

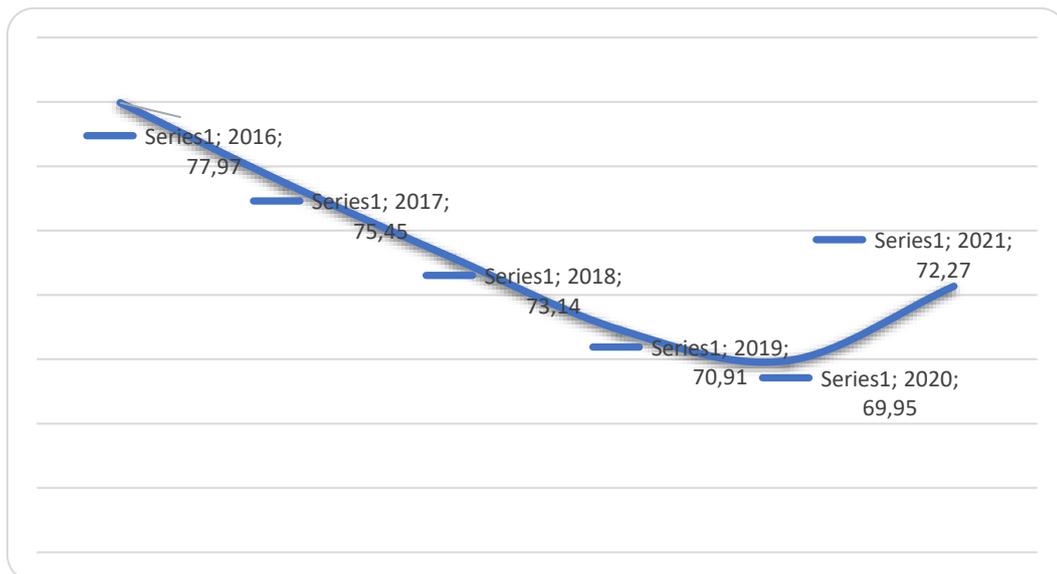


Gambar 2. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Lampung Sebelum dan Selama Covid-19
Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Gambar 2 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota di Lampung sebelum Covid-19 cenderung mengalami peningkatan hingga 2021. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah sebelum dan pada saat Covid-19 cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada penelitian ini dinyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan pada rata-rata lama sekolah justru tidak berpengaruh pada ketimpangan wilayah di kabupaten/kota di Lampung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, R. N. T., & Monika, 2017) yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan wilayah suatu daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni (2019) bahwa rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah yang dapat diindikasikan bahwa pendidikan tidak selalu mempengaruhi ketimpangan wilayah.

Jumlah penduduk miskin

Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak menjadimasalah selama produktivitas penduduk daerah yang bersangkutan juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang. Permasalahan akan muncul ketika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang akan berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan. Penambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Berikut disajikan gambar jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Lampung sebelum dan selama Covid-19.



Gambar 3. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Lampung Sebelum dan Selama Covid-19
Sumber: Olahan Peneliti, 2022

Gambar 3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Lampung sebelum Covid-19 mengalami penurunan dari tahun 2016 hingga 2020 dan selama Covid-19 jumlah penduduk miskin meningkat kembali mencapai 72,27. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah mengalami penurunan sebelum terjadinya Covid-19 sedangkan pada saat Covid-19 mengalami peningkatan, hal ini dapat disebabkan karena adanya penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan pendapatan.

Upaya dalam mengurangi penyebaran wabah COVID-19 langkah yang dilakukan setiap negara adalah melakukan kebiasaan dengan cara sering mencuci tangan, hindari menyentuh area wajah, hindari

berjabat tangan dan berpelukan, menggunakan barang pribadi, lakukan etika batuk dan bersin, hindari berkumpul dalam jumlah banyak, mencuci bahan makanan, gunakan disinfektan, *social distancing*. Pemerintah mengeluarkan kebijakan beraktifitas di dalam rumah saja untuk mencegah penyebaran virus. Dengan bekerja di rumah, belajar di rumah, menjaga kebersihan. Mengisolasi diri merupakan salah satu tindakan memutuskan mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Namun disisi lain mengisolasi memberi dampak signifikan yang di rasakan yang mencari nafkah di luar rumah, terutama sektor informal yang merupakan kelompok marginal paling kuat terkena dampaknya bahkan banyak yang di PHK dan di rumahkan, bahkan akan muncul kelompok rentan baru akibat di rumahkan dan tidak bisa mencari pekerjaan atau kehilangan pekerjaan (Winanti, P. S., & Mas'udi, 2020).

Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, (2020) sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19 yang paling signifikan adalah sektor rumah tangga karena tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi dan secara otomatis terhenti untuk beberapa waktu sehingga tidak mendapat penghasilan untuk kehidupan keluarganya. Akibatnya daya beli masyarakat menurun, aktivitas pendidikan menurun, kesehatan menurun, sehingga bertambahnya masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan permasalahan umum yang dialami oleh setiap negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menggambarkan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok dapat diartikan sebagai suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi.

Menurut World Bank (2004) salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Hipotesa Neo-Klasik yang terbukti benar di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung terjadi ketimpangan. Dimana Hipotesa Neo-Klasik mengatakan pada permulaan proses pembangunan suatu wilayah, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan lebih cenderung meningkat. Kemudian, bila proses pembangunan terus berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan wilayah tersebut akan menurun. Menurut Todaro & Smith (2006) PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Dimana adanya laju pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan dengan upaya melakukan pendekatan untuk memilih sektor- sektor mana saja yang mendapatkan prioritas, sehingga sumber daya yang tersedia di masing-masing wilayah terkelola secara optimal serta perlunya menyusun lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan tersebut dan lain sebagainya.

Melihat kondisi perekonomian di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung tersebut, dapat dikatakan pemerintah telah melakukan upaya dalam mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan wilayah yaitu dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan melalui Perpres No. 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019. Diharapkan adanya Perpres No. 131 tahun 2015 tersebut maka perhatian pemerintah Provinsi Lampung dalam pembangunan ekonomi wilayah berfokus pada Kabupaten/Kota yang tertinggal atau terbelakang di Provinsi Lampung. Sehingga pembangunan ekonomi wilayah yang telah dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tersebut bisa menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah Provinsi Lampung 2013-2017. Namun, Dalam hal ini justru pembangunan ekonomi wilayah terfokus pada wilayah bagian tengah Provinsi Lampung misalnya Kota Bandar Lampung dan sebagainya dimana yang sebagian besar Kabupaten/Kota tersebut merupakan wilayah maju, sehingga kebijakan tersebut belum terealisasi dengan baik sesuai dengan tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut yaitu melakukan pembangunan di wilayah-wilayah yang tertinggal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Williamson kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebelum pandemi covid-19 mengalami peningkatan. Indeks Williamson kabupaten/kota di Provinsi Lampung sepanjang periode tahun 2016-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nilai indeks pada tahun 2016 sebesar 0,26 meningkat menjadi 0,28 di tahun 2017, 2018 dan 2019 mencapai 0,32, sedangkan ketimpangan wilayah tahun 2020 juga mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi 0,27. Secara teoritis, angka kesenjangan tersebut masih berada pada tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah yang rendah (kurang dari 0,35). Kondisi ini tidak lepas dari adanya pengaruh kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Limitasi atau kekurangan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kuantitatif tanpa melihat pengaruh variabel bebas terhadap ketimpangan (tanpa analisis regresi). Pada penelitian selanjutnya apabila ingin menggunakan variabel ketimpangan dapat melakukan estimasi dengan menggunakan analisis regresi dan menggunakan variabel lain yang mempengaruhi ketimpangan agar hasilnya lebih bervariasi dan memperbarui periode penelitian.

Ucapan Terima Kasih

Puja dan puji syukur ke Hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah memberikan kami segala kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini dalam waktu yang sesingkat-sesingkatnya. Tak lupa ucapan terima kasih kami haturkan dengan tulus kepada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Meskipun Artikel saya masih jauh dari kata sempurna, Semoga hasil yang didapatkan sebaik kerja keras yang telah saya berikan untuk pembuatan artikel ini. Sekian dan Terima kasih.

Referensi

- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 196–210.
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusni, A. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum Provinsi dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ecogen*.
- Baidhaway, Z. (2015). Kemiskinan dan Kritik Atas Globalisme Neo-Liberal. In *LP2M IAIN Salatiga*.
- Jhingan, M. L. (1999). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kalalo, T., Engka, D. S. M., & Maramis, M. T. B. (2016). Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(01), 818–830.
- Kuncoro, M. (2001). *Analisis Spasial dan Regional*. UPP AMP YKPN.
- North, D. C. (1955). Location Theory and Regional Economic Growth. *Journal of Political Economy*, 63(3), 243–258. <https://doi.org/10.1086/257668>
- Sari, D. N., Gunarto, T., & Husaini, M. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Sari, R. M., Hidayat, J. T., & Yogie, M. S. (2017). Ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 1(1), 1–10.
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Pandemic, Impact of COVID-19's Indonesia, on the Economy of. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal), Humanities and Social Sciences*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Economic development 8th edition. In *Manila, Philippines: Pearson South Asia Pte. Ltd.*
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development. In *Pearson*. <https://doi.org/10.26417/ejes.v3i1.p133-142>
- Wahyuni, R. N. T., & Monika, A. K. (2017). Pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*.

- Williamson, S. D. (2018). *Macroeconomics Sixth Edition* (Sixth Edit). Pearson Education Limited.
- Winanti, P. S., & Mas'udi, W. (2020). *Menyelamatkan kelompok rentan: kebijakan inklusif penanganan dampak COVID-19*.
- World Bank. (2004). *World Development Report 2004 : Making Services Work for Poor People*.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5986>